

STRATEGI PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) DI KECAMATAN DULUPI KABUPATEN BOALEMO

Sri Hantuti Paramata¹⁾ Nur Eng Mokodompit²⁾ Sukrianto Mustapa³⁾

^{1,2,3)} Program Studi Ekonomi Pembangunan, Universitas Muhammadiyah Gorontalo
nurengmokodompit@umgo.ac.id

Abstract

This study aims to determine how the empowerment strategy for Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) in Dulupi Sub-District, Boalemo Regency, is implemented. The research uses a qualitative approach, as the instruments used to conduct the research employ interview techniques with key informants and other relevant informants related to the research problem. The results of the study indicate that MSME empowerment strategies implemented in Dulupi Subdistrict, Boalemo Regency, have been widely carried out by the local government down to the subdistrict level using various approaches, including providing assistance, strengthening business management, facilitating MSMEs experiencing problems or starting a business, providing access to and facilitating the acquisition of capital, and assisting MSME actors in terms of product legality and business legality.

Keywords: Strategy; Empowerment; MSMEs

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana strategi pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kecamatan Dulupi Kabupaten Boalemo dilaksanakan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, karena instrumen yang digunakan untuk melakukan penelitian menggunakan teknik wawancara dengan menetapkan informan kunci dan informan lainnya yang relevan dengan masalah yang diteliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi pemberdayaan UMKM yang dilakukan di Kecamatan Dulupi Kabupaten Boalemo telah banyak dilakukan oleh pemerintah daerah hingga ke tingkat kecamatan dengan berbagai pendekatan, antara lain melakukan pendampingan, penguatan manajemen usaha, memfasilitasi UMKM yang mengalami masalah maupun yang baru membuka usaha, memberikan akses dan kemudahan memperoleh modal, serta membantu pelaku UMKM dalam aspek legalitas produk dan legalitas usaha.

Kata Kunci: Strategi, Pemberdayaan, UMKM

Received: 05 Juli 2025

Revised: 06 Juli 2025

Accepted: 10 Juli 2025

PENDAHULUAN

Undang-Undang Republik Indonesia No.20 tahun 2008 tentang UMKM.22 pasal 1 dari UU tersebut, menyatakan bahwa usaha mikro merupakan kelompok pelaku ekonomi terbesar di bidang Pendapatan di Indonesia selain itu juga sebagai stimulan Pendapatan pada negara berkembang. Tidak heran jika saat terjadi krisis melanda dunia bahkan negara Amerika Serikat. Tetapi krisis tersebut hampir tidak dirasakan oleh negara Indonesia yang kegiatan Pendapatannya dijalankan oleh Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

UMKM memiliki peran sebagai sektor yang berpotensi dan dapat menjaga stabilitas pendapatan. Perlu diketahui bahwasannya UMKM memiliki keterlibatan terhadap angkatan kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Peran UMKM yang paling nampak adalah penyerapan tenaga kerja. UMKM mempunyai peranan penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dimulai dari tingkat pendapatan, hal ini tentunya akan membutuhkan jumlah pekerjaan yang lebih besar, UMKM yang pada akhirnya akan berdampak pada peningkatan pendapatan individu. Selain itu gaji yang memadai dapat memenuhi

kebutuhan domestik individu dan meningkatkan kemampuan mereka untuk melakukan pembelian. Selain itu, peningkatan kapasitas pembelian masyarakat dapat berkontribusi pada penyediaan fasilitas yang memadai untuk penghidupan mereka.

Kegiatan ekonomi adalah suatu usaha untuk meningkatkan daya dan taraf hidup masyarakat. Dengan semakin meningkatnya pertumbuhan ekonomi, maka kebutuhan masyarakat akan terpenuhi. Maka, dibutuhkan lapangan pekerjaan yang mampu menyerap setiap angkatan kerja yang ada. Indonesia adalah sebuah negara yang penuh dengan kekayaan alam, namun belum memaksimalkan potensi yang ada pada diri sendiri maupun yang ada di wilayah masing-masing sehingga kebutuhan mereka bisa terpenuhi.

Masyarakat yang mempunyai kemampuan dalam mengembangkan potensi yang dimiliki agar dapat memenuhi kebutuhan hidup dan dapat menemukan peluang ataupun membuka peluang untuk masyarakat. Dengan adanya peluang usaha tersebut diharapkan dapat membantu pertumbuhan ekonomi sekitar dengan harapan menjadi lebih baik sehingga mampu mengurangi tingkat urbanisasi yang tinggi dan juga mengurangi angka pengangguran di daerah sekitar. Pada peluang usaha yang ada di daerah sekitar diharapkan menjadi ikon atau ciri khas dari daerah tersebut.

Menurut Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 1 Ayat 12 menjelaskan bahwa: Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya untuk mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa

Kecamatan Dulupi yang memiliki luas 299,76 km² dengan jumlah penduduk 17.444 yang tersebar di 8 desa dimana sebagian besar berpenghasilan yang bersumber dari pertanian tentunya mendorong pemerintah daerah untuk membuka kesempatan usaha lain selain dari sector pertanian. Salah satunya melalui pengembangan UMKM melalui intervensi program pemerintah daerah. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Boalemo bahwa jumlah UMKM di Kabupaten Boalemo berjumlah 4.468 UMKM. Dimana 334 buah terletak di Kecamatan Dulupi.

Berdasarkan pengamatan awal yang telah dilakukan di Kecamatan Dulupi diketahui bahwa Upaya Pemberdayaan UMKM di Kecamatan Dulupi masih belum optimal, hal ini dapat dilihat dari indikator permasalahan sebagai berikut:

1. Minimnya modal usaha, modal ialah salah satu kasus utama yang kerap dirasakan UMKM. Terbatasnya jumlah modal merupakan kendala utama dalam pengembangan UMKM di Kecamatan Dulupi. Mayoritas pengusaha menggunakan modal sendiri dalam menjalankan usahanya. Kurangnya permodalan UMKM, oleh karena pada umumnya usaha kecil dan menengah merupakan usaha perorangan yang mengandalkan pada modal dari pemilik UMKM yang jumlahnya sangat terbatas, sedangkan modal pinjaman dari bank atau lembaga keuangan lainnya sulit diperoleh, karena persyaratan secara administratif dan teknis yang diminta oleh bank tidak dapat dipenuhi.
2. Kurangnya penyediaan sarana dari pemerintah kecamatan untuk memperlancar pemasaran hasil produksi barang dan jasa dari masyarakat.

Berdasarkan uraian yang ada pada latar belakang penelitian diatas, permasalahan dalam penelitian ini yaitu Strategi Pemerintah Desa Melalui Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Dan

Menengah (UMKM) Di Kecamatan Dulupi Kabupaten Boalemo belum berjalan dengan maksimal penelitian skripsi yang berjudul “Strategi Pemerintah Desa Melalui Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Di Kecamatan Dulupi Kabupaten Boalemo.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologis atau penelitian fakta lapangan, di mana peneliti secara langsung berhadapan dengan fokus masalah yang diteliti sehingga lebih mudah mendeskripsikannya berdasarkan temuan penelitian. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif karena sesuai dengan tujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, dan pemikiran individu maupun kelompok (Sutopo & Arief, 2010). Peneliti berperan sebagai instrumen utama dalam pengumpulan data, analisis, penafsiran, dan pelaporan hasil penelitian, dengan bertindak sebagai pengamat penuh terhadap seluruh dinamika yang terjadi di lapangan. Penelitian dilaksanakan di Kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalemo, selama bulan Maret hingga April 2025. Sumber data terdiri atas data primer yang diperoleh langsung dari informan atau instansi terkait melalui wawancara dan observasi, serta data sekunder yang diperoleh secara tidak langsung dari dokumen atau lembaga terkait. Teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan secara kualitatif mengikuti model Miles dan Huberman, yang mencakup tiga tahapan utama: reduksi data (pemilihan, penyederhanaan, dan pengabstrakan data mentah menjadi informasi penting), penyajian data (penyusunan informasi dalam bentuk matriks, grafik, atau peta untuk memudahkan interpretasi), dan penarikan kesimpulan serta verifikasi (mencari pola, hubungan sebab akibat, serta memperkuat temuan melalui pengujian berkelanjutan

hingga menghasilkan kesimpulan yang bersifat grounded). Keabsahan data diperiksa melalui tiga kriteria utama, yaitu kredibilitas (tingkat kepercayaan terhadap data), transferabilitas (kemungkinan penerapan hasil pada konteks lain), dan konfirmabilitas (tingkat objektivitas hasil penelitian), yang seluruhnya bertujuan memastikan validitas dan reliabilitas hasil penelitian.

HASIL PENELITIAN

Kecamatan Dulupi memiliki 8 desa memiliki usaha-usaha mikro kecil dan menengah sebagaimana table dibawah ini:

Tabel 2. Jumlah Pelaku UMKM Menurut Jenis Usaha Kecamatan Dulupi Kabupaten Boalemo Tahun 2025

N o.	Desa	Toko/ Warung Kelontong	Warung/ Kedai Makan	Restoran / Rumah Makan
1.	Dulupi	60	15	2
2.	Pangi	32	15	-
3.	Tangga Jaya	34	9	-
4.	Polohungo	30	10	1
5.	Kotaraja	35	11	1
6.	Tabongo	12	26	-
7.	Tanah Putih	45	30	1
8.	Tangga Barito	83	7	-
		331	123	5

Sumber: Kecamatan Dalam Angka, 2025

Berdasarkan table di atas, dapat diketahui bahwa hingga tahun 2025 UMKM di Kecamatan Dulupi telah berkembang Dimana usaha di bidang took/kios atau warung kelontong berjumlah 331 yang tersebar di 8 desa. Demikian pula warung/kedai rumah makan berjumlah 123unit usaha serta terdapat 5 rumah makan berskala restoran yang tersebar pada 4 desa.

PEMBAHASAN

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) memiliki peran krusial dalam perekonomian Indonesia terutama di daerah-daerah. UMKM berfungsi sebagai

tulang punggung ekonomi, pemyumbang besar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) maupun terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), menyerap tenaga dan mendorong pemerataan ekonomi. Dan yang paling terasa bahwa UMKM mampu menciptakan lapangan kerja yang berdampak pada daya beli Masyarakat serta dapat mengentaskan kemiskinan..

Beberapa point yang dapat dibahas berdasarkan hasil penelitian ini dalam strategi pemberdayaan UMKM di Kecamatan Dulupi Kabupaten Boalemo:

1. Strategi pemberdayaan UMKM di Kecamatan Dulupi dalam membangun kekuatan (*Empowering*) terkait dengan penguatan pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki masyarakat dalam pengembangan usahanya.

Berdasarkan aspek ini pemerintah kecamatan telah mampu mendorong penguatan (*Empowering*) dalam mendorong perkembangan UMKM telah dilaksanakan dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan dan meningkatkan kualitas hidup. Pemberdayaan harus mampu menumbuhkembangkan segenap kemampuan diri serta kepercayaan Masyarakat sehingga menuju kemandirian. Dalam hal ini diketahui bahwa program pemberdayaan UMKM. Dalam hal ini pemerintah kecamatan Dulupi telah menjalankan tugas dan perannya sebagai Pembina, fasilitator melalui kolaborasi berbagai stakeholder khususnya dalam menjembatani UMKM dalam memperoleh modal usaha serta kemudahan-kemudahan aspek legalitas pemberian izi usaha.

2. Strategi apa yang dilakukan pemerintah Kecamatan Dulupi dalam melindungi (*Protecting*) dalam arti melindungi masyarakat terutama kelompok-kelompok lemah dan menghindari persaingan yang tidak seimbang Dengan pengetahuan dan keterampilan

yang lebih baik, UMKM dapat meningkatkan daya saingnya di pasar, baik dalam hal produk maupun layanan.

Edukasi dapat memberikan pelaku UMKM pengetahuan dan keterampilan baru, seperti manajemen keuangan, pemasaran digital, dan pengembangan produk, yang dapat membantu mereka mengelola usaha dengan lebih efektif dan efisien.

Pemberdayaan harus diarahkan pada penghapusan segala jenis diskriminasi dan dominasi yang tidak menguntungkan masyarakat kecil. Yang menjadi permasalahan dalam hal aktivitas perlindungan yang diberikan oleh pemerintah lewat program-program pemberdayaan belum optimal dan belum dirasakan oleh para pelaku usaha.

Pemerintah sebagai pembina dan fasilitator dalam hal konsultasi mengenai masalah atau kendala yang ditemukan oleh para pelaku usaha dalam mengelola usaha mereka belum dilakukan dengan baik. Berbagai kendala yang ditemukan oleh para pelaku usaha dalam mereka mengelola usaha mereka selalu dipecahkan lewat konsultasi sesama pelaku usaha itu sendiri. Dalam hal keterlibatan pemerintah untuk turun langsung meninjau atau memantau perkembangan usaha dari pelaku usaha di pasar pinasungkulan karombasan masih kurang

3. Dukungan (*Supporting*) yaitu pemberian bimbingan dan dukungan kepada masyarakat lemah agar mampu menjalankan peran dan fungsi kehidupannya. Pemberdayaan harus mampu menyokong masyarakat agar tidak terjatuh ke dalam keadaan dan posisi yang semakin lemah dan terpinggirkan. Pemberdayaan harus melindungi kelompok lemah, minoritas dan masyarakat terasing.

Dalam hal ini bentuk dukungan yang dilakukan oleh pemerintah, yaitu mengadakan sosialisasi, pembinaan dan juga pelatihan bagi setiap para pelaku usaha, serta mengikutsertakan para pelaku usaha dalam pameran agar mereka dapat mempromosikan usaha mereka. Pemerintah juga menyediakan sarana dan prasarana bagi setiap para pelaku usaha sebagai tempat mereka berjualan seperti, ruko-ruko atau lapak-lapak di pasar. Tetapi yang menjadi permasalahan dalam hal dukungan yaitu menurut para pelaku usaha, sampai saat ini belum pernah diadakan sosialisasi, pembinaan, pelatihan dan juga pameran untuk mengundang para pelaku usaha untuk ikutserta dalam kegiatan pameran tersebut. Ada sebagian dari mereka mengatakan mungkin ada, tetapi mereka tidak pernah mengikutinya.

4. Strategi pemberdayaan melalui aspek pengembangan (*Fostering*) yaitu memelihara kondisi kondusif agar tetap terjadi keseimbangan distribusi kekuasaan antara berbagai kelompok masyarakat. Pemberdayaan harus mampu menjamin keseimbangan dan keselarasan yang memungkinkan setiap orang memperoleh kesempatan usaha

Pemberdayaan harus mampu menjamin keseimbangan dan keselarasan yang memungkinkan setiap orang memperoleh kesempatan usaha. Namun dalam aspek keempat ini pemerintah kecamatan masih belum maksimal melaksanakan fungsinya. Karena pelaku UMKM pada umumnya masih menggunakan modal melalui upaya sendiri. Walaupun untuk aspek-aspek lain pemerintah kecamatan mampu memfasilitasi terkait dengan penguatan usaha yang bekerja sama dengan Dinas koperasi dan perdagangan, namun hal ini masih terasa belum maksimal oleh pelaku usaha.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan di atas, maka kesimpulan penelitian adalah:

Strategi pemberdayaan UMKM yang dilakukan di Kecamatan Dulupi Kabupaten Boalemo telah banyak dilakukan oleh pemerintah daerah hingga kecamatan telah dilakukan dengan berbagai pendekatan; antara lain melakukan pendampingan, penguatan manajemen usaha, memfasilitasi UMKM yang mengalami masalah maupun membuka usaha, memberikan akses dan kemudahan memperoleh modal serta membantu pelaku UMKM dalam dari aspek legalitas produk dan legalitas usaha.

Sehubungan dengan berbagai hambatan dalam upaya mendorong perkembangan UMKM di Kecamatan Dulupi pemerintah kecamatan senantiasa memperkecil hambatan-hambatan yang ada seperti kekurangan modal, hal-hal terkait dengan aspek perizinan usaha dan lain sebagainya.

DAFTAR PUSTAKA

- Alex Sandra, & Purwanto, E.2015. Pengaruh Faktor-Faktor Eksternal dan Internal Terhadap Kinerja Usaha Kecil dan Menengah di Jakarta. *Business Management*, 11(1), pp.97-124. https://www.e-jurnal.com/2014/11/analisisfaktor-faktor-yang_24.html
- Kooten dalam Salusu, 2006:104-105, tipe-tipe strategi, Jakarta, Alfabeta
- Lili Baridi, Muhammad Zein, M. Hudri, 2006, Zakat dan Wirausaha, Jakarta: CED.
- Moleong. Lexy J. 2008. Metodologi Penelitian Kualitatif. Edisi Revisi. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Mardikanto Totok. Soebiarto Poerwoko. 2019. Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik. Bandung. Alfabeta.

- Musran Munizu. 2010. Pengaruh Faktor-Faktor Eksternal dan Internal Terhadap Kinerja Usaha Mikro dan Kecil (UMK) di Sulawesi Selatan. *Jurnal Manajemen Dan Kewirausahaan*, 12(1), pp.33-41. <http://puslit2.petra.ac.id/ejournal/index.php/man/article/view/17987>
- Rosmedi dan Riza Risyanti. 2006. *Pemberdayaan Masyarakat*. Sumedang: Alqaprit Jatinegoro.
- Suharto, R. S. 2004. *Dimensi-dimensi Pemberdayaan*. Bandung: Refika Aditama.
- Pamungkas, H. A., & Hidayatulloh, A. 2019. Faktor Penentu Perkembangan UMKM Gerabah Kasongan Bantul Yogyakarta, *Jurnal Inovasi*, 15 (1).
- Zabidi, Y., & Astuti, M. (2022). Perancangan Instrumen Pengukuran Produktivitas Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Kerajinan Batik Kayu Krebet Bantul. VII, 249–258.